



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUKABUMI**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2018**

## Kata Pengantar

---

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2018, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.



Kepala,

**Dis. H. ADE MULYADI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 198608 1 001

# Daftar Isi

---

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
<b>Bab II Rencana Strategis</b> .....	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	8
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .....	12
<b>Bab III Penutup</b> .....	21

# Bab I Pendahuluan

---

## 1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi kepada Bupati.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi;

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi :

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan syarat



- kerja, bidang transmigrasi; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
  - f. pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
  - g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas Disnakertrans sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana diamanatkan juga dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepala Disnakertrans dalam hal ini bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Disnakertrans selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Disnakertrans memprioritaskan pada Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

## Bab II Rencana Strategis

---

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang diharapkan, maka ditetapkan Visi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, yaitu:

***“Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Kondusif dan Berkeadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai Religius dan Mandiri”***

dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja;
2. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
3. Pembinaan dan evaluasi syarat kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Pembinaan dan persebaran transmigrasi.

### Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

#### A. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam jangka menengah yaitu,

**“ Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha ”.**

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja;
- 2) Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam potensi daerah;
- 3) Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Disnakertrans Kabupaten Sukabumi beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2		3		4	5					
1.	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha	1.1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja/serta Melindungi Hak-hak Pekerja	1.1.1.	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,64	93,75	93,84	93,94	94,05	94,15
				1.1.2.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	54,67	55,77	56,88	58,02	59,18	60,36
				1.1.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	54,67	55,77	56,88	58,02	59,18	60,36
				1.1.4.	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	Orang	140	140	140	140	140	140
				1.1.5.	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	Orang	100	100	100	100	100	100

			1.1.6.	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	Orang	200	200	200	200	200	200
			1.1.7.	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100
	1.2.	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	1.2.1.	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)	Orang	20	40	40	40	40	40
	1.3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	1.3.1.	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan	%/ tahun	15	16,2	16,8	17	17,5	17,5
			1.3.2.	Jumlah KK transmigran yang dibina	KK	30	30	30	30	30	30

## **2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018**

Rencana Kinerja Tahunan Disnakertrans Tahun 2018 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Disnakertrans Tahun 2018 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2017 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Rencana Kinerja Tahunan ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2018**

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja/serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,84	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	Jobfair	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Rekrutmen tenaga kerja/lowongan kerja di perusahaan  <b>Outcome :</b> Meningkatnya Pencari Kerja yang terserap	Rupiah Orang Bulan  Perusahaan  %	80.885.000 12 3  20  75	
	Pencari kerja yang ditempatkan	%	56,88					Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah anggota masyarakat yang diikutsertakan dalam TTG <b>Outcome :</b> Meningkatnya pengembangan TTG bagi masyarakat	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	76.030.000 8 3  20  95	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	56,88					Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah tenaga kerja penganggur sementara <b>Outcome :</b> Mengurangi penganggur sementara	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	176.000.000 8 3  40  90	
									Perluasan Kesempatan Kerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM	Rupiah Orang	170.000.000 12



Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Waktu <b>Output :</b> Jumlah tenaga kerja sementara disuatu desa yang teracuan <b>Outcome :</b> Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Bulan  Orang  %	3  88  95	
								Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah BKK yang terbina <b>Outcome :</b> Meningkatnya pencari kerja dalam mengisi lowongan pekerjaan	Rupiah Orang Bulan  BKK  %	49.000.000 7 3  60  90	
								Pembinaan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Tenaga kerja indonesia <b>Outcome :</b> Meningkatnya pembinaan tenaga kerja indonesia swasta melalui PPTKIS	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	30.000.000 8 3  30  90	
								Pembinaan Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengembangan Kelembagaan (Dewan Pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, Mayday)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Dewan pengupahan, mayday, LKS tripartit, LKS bipartit <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan  Orang	270.000.000 5 12  130	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	%	100	
	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	Orang	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%	11,17	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	355.193.000 13 3	
					kualitas tenaga kerja yang memiliki keahlian/kompetensi	Orang	1.020			<b>Output :</b> Jumlah peserta kejuruan las industri Jumlah peserta bidang mesin produksi Jumlah peserta bidang perakitan komputer Jumlah peserta bidang kejuruan menjahit Jumlah peserta bidang instalasi listrik	Orang Orang Orang Orang Orang	40 20 20 20 20
	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	Orang	200					Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	328.908.000 13 3	
									<b>Output :</b> Jumlah masyarakat pedesaan terlatih dalam bidang keahlian menjahit kaos Jumlah masyarakat pedesaan terlatih dalam bidang bengkel sepeda motor	Orang Orang	20 20	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Jumlah masyarakat pedesaan terlatih dalam bidang keahlian PHP	Orang	20	
									Jumlah masyarakat pedesaan terlatih dalam bidang keahlian PHP	Orang	20	
									Jumlah masyarakat pedesaan terlatih dalam bidang keahlian PHP	Orang	20	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	80	
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	113.610.200 13 12	
									<b>Output :</b> Jumlah peserta bimtek akreditasi kompetensi LPK	LPK	55	
									Jumlah peserta pelatihan menjahit	Orang	20	
									Jumlah peserta workshop sinergitas pelatihan kerja	Orang	55	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya kualitas lembaga latihan kerja	%	100	
									Meningkatnya kualitas pencari kerja	%	100	
								Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat (PIK Sektoral)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	100.000.000 13 3	
									<b>Output :</b>			

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Jumlah masyarakat kecamatan cibadak yang terlatih bidang keahlian las industri	Orang	20	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat pedesaan	%	85	
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	%	100	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial dan syarat kerja dengan perusahaan dan pekerja/buruh di wilayah kabupaten sukabumi	perusahaan	250	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Perselisihan hubungan industrial <b>Outcome :</b> Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial	Rupiah Orang Bulan  Perusahaan  %	77.017.000 5 3  68  100	
								Pelayanan Pemulangan TKI	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah TKI yang bermasalah yang pulang ke Wilayah Kab.Sukabumi <b>Outcome :</b> Meningkatkan pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	40.000.000 6 12  5  85	
								Pembinaan dan Evaluasi Serikat Kerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b>	Rupiah Orang Bulan	40.000.000 5 6	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Jumlah peserta seleksi pekerja teladan yang terpilih dikabupaten sukabumi	Orang	100	
									Jumlah pekerja telada yang terpilih dikabupaten sukabumi	Orang	3	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya etos kerja yang lebih baik di perusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif	%	90	
								Pembinaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Perusahaan yang dibina mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah kab. Sukabumi <b>Outcome :</b> Meningkatnya ketertiban administrasi tenaga kerja asing diperusahaan yang ada diwilayah kab. Sukabumi	Rupiah Orang Bulan Orang %	20.000.000 7 12 307 100	
								Rapat Koordinasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b>	Rupiah Orang Bulan	70.000.000 5 3	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									Peserta Rakor (OPD, kecamatan, perusahaan dan instansi terkait)	Orang	150	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya koordinasi urusan ketenagakerjaan yang kondusif diwilayah kab. Sukabumi	%	100	
Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan	% / tahun	16,8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya Animo Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi	%	65	Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	43.802.950 7 12	
									<b>Output :</b> Jumlah transmigran yang akan dikirim ke luar pulau jawa	KK	10	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya Jumlah Transmigran asal kab. Sukabumi	%	75	
								Peningkatan Kerjasama antar Wilayah dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	41.810.000 7 12	
								<b>Output :</b> Jumlah MoU kerjasama antar wilayah transmigrasi	MoU	1		
								<b>Outcome :</b> Meningkatnya kerjasama antar wilayah (MoU) Informasi calon transmigran	%	65		
									%	75		
								Sosialisasi Transmigrasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	36.325.000 5 6	
								<b>Output :</b> Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi	Orang	150		

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
									<b>Outcome :</b> Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	%	75	
	Jumlah KK transmigran yang dibina	KK	30		Meningkatnya Animo Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi	%	100	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah lokasi transmigrasi yang dimonitoring dan evaluasi <b>Outcome :</b> Meningkatnya masyarakat transmigrasi yang berkualitas	Rupiah Orang Bulan  Lokasi	87.689.000 5 12  2	
					Meningkatnya Animo Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi	%	65	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi (translok)	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Masyarakat Transmigrasi Lokal Yang terbina  <b>Outcome :</b> Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang terbina	Rupiah Orang Bulan  Lokasi  %	51.780.000 7 12  5  75	

## Bab III Penutup

---

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja Tahunan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018.



Kepala,

**Drs. H. ADE MULYADI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 198608 1 001